

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI PASAR
PINASUNGKULAN KAROMBASAN KOTA MANADO**

YULITA R.F TINTINGON

ALDEN LALOMA

DEYSI TAMPONGANGOY

cikatintingon27@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Manado telah berlangsung sejak tahun 2016 sesuai dengan peraturan Walikota Manado Nomor 46 Tahun 2016. Pelaksanaan pemberdayaan UMKM di pasar pinasungkulan karombasan didapati belum berjalan dengan optimal, beberapa kendala yang menghambat jalannya program pemberdayaan UMKM diantaranya; kurangnya keterlibatan dari pemerintah untuk turun langsung ke pasar untuk mensosialisasikan tentang adanya program pemberdayaan UMKM, tidak efektifnya mekanisme sosialisasi yang dilakukan mengakibatkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman para pelaku usaha dalam memanfaatkan adanya pemberdayaan UMKM. anggaran dana dari pemerintah yang tidak tersalurkan bagi para pelaku UMKM di pasar pinasungkulan karombasan, sehingga membuat para pelaku usaha, menggunakan dana pribadi dalam membuka usaha mereka. bahkan belum adanya pelatihan atau pembinaan bagi setiap para pelaku usaha, mempengaruhi usaha mereka sehingga tidak dapat bersaing di pasar nasional.

Kata kunci: Pemberdayaan, Usaha Kecil dan Menengah

Abstract

Empowerment of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Manado city has been going on since 2016 in accordance with manado mayor regulation No. 46 of 2016. The implementation of MSME empowerment in the karombasan pinasungkulan market was found not to have been running optimally, some obstacles that hindered the implementation of MSME empowerment programs among others; lack of involvement from the government to get down directly to the market to socialize about the empowerment program of MSMEs, ineffective socialization mechanisms that are carried out resulting in ignorance and incomprehension of businesses in utilizing the empowerment of MSMEs. budget from the government that is not distributed to MSMEs in the karombasan pinasungkulan market, thus making businesses, using private funds in opening their businesses. there is not even training or coaching for every business person, affecting their business so that they cannot compete in the national market.

Keywords: Empowerment, Small and Medium Enterprises

PENDAHULUAN

Ketika terjadi krisis moneter melanda Indonesia di Tahun 1998, banyak investor dan pengusaha besar yang mengalihkan modalnya ke negara – Negara lain, sehingga perekonomian Indonesia dikala itu semakin terpuruk. Namun Usaha kecil dan menengah mampu bertahan, cenderung bertambah dan mampu menopang roda perekonomian bangsa Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor industri yang hanya sedikit terkena dampak krisis global yang melanda dunia, karena Usaha Kecil dan Menengah dapat di perhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar. Usaha Kecil dan Menengah selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern, serta mampu menyerap tenaga kerja. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Kebanyakan para pengusaha kecil dan menengah berasal dari industri keluarga/rumahan, dengan demikian konsumennya pun berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Manado sangat strategis dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Manado kecamatan wanea terdapat salah satu pasar tradisional yaitu pasar pinasungkulan karombasan yang menjadi pusat perdagangan dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi seperti halnya di daerah lain, Usaha Kecil dan Menengah di pasar Pinasungkulan Karombasan sudah cukup berjalan baik meskipun masih ditemui permasalahan – permasalahan, seperti: aparat pemerintah yang kurang

memperhatikan dan memberikan pembinaan (pemberdayaan) kepada masyarakat Usaha Kecil dan Menengah juga kurang memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat, terlebih peningkatan akses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan profesionalisme pelaku UKM yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana mereka tidak cepat berkembang, sehingga membuat mereka tidak dapat bersaing di pasar nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Suharto (2005) Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Menurut Ebert dan Griffin (2005)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas, usaha kecil dan menengah bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain, yang menjalankan bisnis ialah pemilik sendiri bekerja bebas sesuai dengan kesanggupan.

Menurut Suharto (2004 : 205) pemberdayaan memiliki empat dimensi yang dapat dijadikan indikator pengukuran, yaitu:

1. Kekuatan (*Empowering*) adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
2. Melindungi (*Protecting*) yaitu

melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil.

3. Dukungan (*Supporting*) yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
4. Pengembangan (*Fostering*) yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

Dari keempat indikator diatas, dan menurut dari hasil penelitian yang dilakukan pemerintah dan para pelaku usaha belum berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Manado, dan para pelaku usaha di pasar pinasungkulan

karombasan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif yang selanjutnya akan dianalisis untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian.

2. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus yang diteliti di Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Manado dan para pelaku usaha di pasar pinasungkulan karombasan. Data sekunder yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang berfungsi sebagai penunjang/pendukung data primer.

3. Moleong (2009) mengatakan bahwa salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri merupakan instrumen utamanya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain –lain. Dalam penelitian ini instrumen utama pengumpulan data yaitu peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara (*interview*) dan dibantu/ditunjang dengan teknik observasi dan studi dokumentasi.

4. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif dimana data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk narasi. validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010) yakni: Deskriptif, Interpretasi, dan Teori dalam penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

1. Menurut Bachri (2010) ada 4, yaitu: Derajat kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), Kepastian (*confirmability*).

2. Variabel yang penulis gunakan adalah Kepastian (*confirmability*). Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Suatu Penelitian dapat disimpulkan objektif jikalau telah mencapai kesepakatan banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh penulis dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memiliki beberapa poin aturan yang berkaitan erat dengan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa poin aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini: Bab II asas dan tujuan pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Bab VI pasal 20 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan intensif bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan

teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Bab VII pembiayaan dan penjaminan pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, dan Usaha Kecil, pemerintah melakukan upaya: pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; pengembangan lembaga modal ventura; pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di kota Manado telah berlangsung sejak tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Walikota Manado No 46 Tahun 2016. Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Manado sangat strategis dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap disektor tersebut.

Di Kota Manado kecamatan wanea terdapat salah satu pasar tradisional yaitu pasar pinasungkulan karombasan, dalam menunjang program pemberdayaan bagi para pelaku usaha di pasar, pemerintah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana seperti ruko-ruko dan lapak-lapak. Dalam masyarakat mengakses dana untuk membuka usaha pemerintah menyediakan beberapa alternatif seperti meminjam di bank pegadaian kredit usaha rakyat (KUR) ataupun menggunakan modal sendiri tetapi kebanyakan para pelaku usaha menggunakan dana mereka sendiri dalam membuka usaha.

Kendala yang didapati dalam pemberdayaan UMKM bagi para pelaku usaha yang paling utama yaitu modal dan juga sumber daya manusia-nya, bagaimana mereka harus mengetahui mengelola usaha mereka dengan baik agar dapat bersaing dengan para pelaku usaha lainnya dan juga dapat bertahan di setiap musim. Dalam menunjang program pemberdayaan UMKM bagi para pelaku usaha di pasar pemerintah mengatakan telah melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan juga pelatihan dan juga

diadakan pameran, pemerintah mengundang setiap para pelaku usaha untuk ikutserta agar dapat mempromosikan setiap usaha mereka. Tetapi ini berbanding terbalik dengan apa yang di katakan oleh para pelaku usaha di pasar mereka mengatakan sampai saat ini belum ada sosialisasi, pembinaan atau pelatihan bagi setiap para pelaku usaha di pasar. Dalam hal keterlibatan pemerintah dalam program pemberdayaan UMKM bagi para pelaku usaha di pasar masih kurang terlibat. Sehingga bisa dikatakan untuk efektivitasnya program pemberdayaan UMKM bagi para pelaku usaha di pasar pinasungkulan karombasan belum efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dari 10 orang informan terhadap pertanyaan seputar pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di pasar pinasungkulan karombasan di Kota Manado adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Empowering*) adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian. Dalam hal ini diketahui bahwa program pemberdayaan dalam aktivitas menumbuhkembangkan kemampuan dan kepercayaan diri setiap pelaku usaha untuk mencapai kemandirian belum terlaksana dengan optimal. Pemerintah telah menjalankan tugasnya sebagai pembina dan fasilitator yang menjembatani para pelaku usaha dalam hal peminjaman modal, tetapi sebagian besar para pelaku usaha dalam mereka membuka usaha dengan menggunakan modal sendiri, tanpa melalui KUR atau alternatif lainnya yang telah disediakan oleh pemerintah.

2. Melindungi (*Protecting*) yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Pemberdayaan harus

diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Yang menjadi permasalahan dalam hal aktivitas perlindungan yang diberikan oleh pemerintah lewat program-program pemberdayaan belum optimal dan belum dirasakan oleh para pelaku usaha. Pemerintah sebagai pembina dan fasilitator dalam hal konsultasi mengenai masalah atau kendala yang ditemukan oleh para pelaku usaha dalam mengelola usaha mereka belum dilakukan dengan baik. Berbagai kendala yang ditemukan oleh para pelaku usaha dalam mereka mengelola usaha mereka selalu dipecahkan lewat konsultasi sesama pelaku usaha itu sendiri. Dalam hal keterlibatan pemerintah untuk turun langsung meninjau atau memantau perkembangan usaha dari pelaku usaha di pasar pinasungkulan karombasan masih kurang.

3. Dukungan (*Supporting*)

Yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah dan terpinggirkan. Dalam hal ini bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengadakan sosialisasi, pembinaan dan juga pelatihan bagi setiap para pelaku usaha., serta mengikutsertakan para pelaku usaha dalam pameran agar mereka dapat mempromosikan usaha mereka. Pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana bagi setiap para pelaku usaha sebagai tempat mereka berjualan seperti, ruko-ruko atau lapak-lapak di pasar. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam hal dukungan yaitu menurut para pelaku usaha, sampai saat ini belum pernah diadakan sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan juga pameran untuk mengundang para pelaku usaha untuk

ikutserta dalam kegiatan pameran tersebut. Ada sebagian dari mereka mengatakan mungkin ada, tetapi mereka tidak pernah mengikutinya.

4. Pengembangan (*Fostering*)

Yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha. Dalam hal pengembangan, pemerintah sebagai pembina menjaga keseimbangan pasar bagi para pelaku usaha, yaitu dengan cara mensurvey ke pasar setiap tahunnya, mengontrol dan mengevaluasi setiap perkembangan usaha yang mereka kelola, apakah mengalami peningkatan atau tidak. Permasalahan yang paling pokok yaitu permodalan, manajemen usaha, teknik dan pemasaran. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kooperasi dan UMKM yang melaksanakan pembinaan, perlindungan dan pengembangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Kekuatan.* Dalam hal aktivitas menumbuhkembangkan kemampuan dan kepercayaan diri setiap pelaku usaha untuk mencapai kemandirian belum terlaksana dengan optimal. Program-program pemberdayaan dalam kegiatan penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup belum terlaksana dan tidak dirasakan oleh pelaku usaha. Pemberdayaan melalui pemberian bantuan dalam hal permodalan maupun bantuan fasilitas penunjang usaha sebagai bentuk penguatan kepada pemilik usaha untuk mencapai kemandirian UMKM belum berjalan dengan maksimal karena tidak dirasakan oleh sebagian besar para pelaku usaha selama mereka memulai dan melakukan aktivitas di pasar pinasungkulan karombasan.
2. *Melindungi.* Dalam aktivitas memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah dan menghindari persaingan yang tidak seimbang belum terlaksana dengan baik. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum berjalan dengan baik, sampai saat ini belum ada lembaga yang mewadahi program pemberdayaan UMKM bagi para pelaku usaha, dan juga masih kurangnya keterlibatan pemerintah untuk turun langsung ke pasar untuk meninjau dan melihat, bagaimana perkembangan usaha yang mereka kelola, serta sebagai sarana untuk para pelaku usaha berkonsultasi ketika ditemukan kendala dalam mereka menjalankan usaha mereka, belum dijalankan dengan baik.
3. *Dukungan.* Dalam aktivitas pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya belum berjalan dengan baik. Pemerintah hanya menyediakan fasilitas fisik namun tidak merangkul dengan baik para pelaku usaha. Upaya memotivasi dan menjaga keberlangsungan UMKM agar mampu bertahan tidak terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan tidak berjalannya pemberdayaan melalui pembinaan dan pemberian pelatihan secara langsung kepada para pelaku usaha.
4. *Pengembangan.* Dalam kegiatan memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat didapati tidak berjalan dengan optimal.

Dalam hal memelihara kondisi agar tetap kondusif, pemerintah setiap tahunnya mengontrol setiap para pelaku usaha, mengevaluasi setiap perkembangan usaha yang mereka kelola di pasar pinasungkulan karombasan apakah mengalami peningkatan atau tidak.

Saran

Bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Manado, dan para pelaku usaha di pasar pinasungkulan karombasan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar program sosialisasi mengenai pelaksanaan pemberdayaan UMKM kepada para pelaku usaha dilakukan mekanisme yang secara langsung diikuti oleh para pelaku usaha, dan juga menyampaikan tentang manfaat mengikuti program-program yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha, agar para pelaku usaha tertarik untuk turut serta dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.
2. Agar pemerintah melakukan komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha melalui pendekatan, menjadi konsultan yang baik terhadap pelaku usaha ketika mereka mengalami kendala dan lebih sering untuk turun langsung ke pasar, untuk melihat dan meninjau perkembangan usaha yang mereka kelola. Agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan optimal.
3. Agar pemerintah melakukan pelatihan dan pembinaan minimal dua kali dalam setahun kepada para pelaku usaha, terlebih lagi dalam hal pelatihan teknologi. Pemerintah juga lebih aktif lagi untuk melakukan program-program pemberdayaan UMKM agar para pelaku usaha mengetahui program pemerintah dalam hal pemberdayaan UMKM di pasar pinasungkulan karombasan.
4. Agar pemerintah melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pelaku usaha, agar pelaksanaan program

pemberdayaan UMKM dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu memberdayakan pelaku UMKM agar dapat berkembang dan dapat bersaing dala pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ebert, R. J dan Griffin R. W. 2005. *Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kwartono, A. M. 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Partomo, U. S dan Soejono, S. 2004. *Peran dan Dampak Usaha Kecil dan Menengah*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Walikota Manado No.46 Tahun 2016 *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kooperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Manado Tipe B*.
- Seran, D. 2017. *Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan tompaso barat kabupaten minahasa*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung. CV.Alfabeta
- Suharto, R. S. 2004. *Dimensi-dimensi Pemberdayaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, K. 2000. *Pengelolaan UKM: Pemberdayaan UKM*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tamara, A. 2008. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Manado (ditinjau berdasarkan UU No*

20 Tahun 2008). Fakultas Hukum
Universitas Sam Ratulangi Manado.

Umar, Husein. 2013. *Metode penelitian untuk
skripsi dan Tesis bisnis.* Jakarta.
Rajawali Pers

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008
*tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.*